

**PENGARUH TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**



Oleh
NURUL HILMI
105731139017

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH
PADA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan oleh:

**NURUL HILMI
NIM:105731139017**

*untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2021/1443H

05/02/2022

1 cap
Smb Alumni

P/10181/AKT/2209
HIL
P'

MOTTO DAN PERSEMBAHASN

MOTTO

Tak peduli apa kata orang, kamu adalah orang yang paling berharga bagi dirimu sendiri

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Rabbil Alamin,

Skripsi ini ku persembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta
Orang – orang yang tersayang dan almamaterku

PESAN DAN KESAN

Jika kebahagiaan bisa ditakar dengan hitungan matematika, tidak akan ada kesedihan. Sayangnya, kebahagiaan bukan soal angka – angka, tetapi sudut pandang dan pemaknaan.



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Nurul Hilmi
No. Stambul/ NIM : 105731139017
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan pengujian skripsi strata (S1) pada tanggal 29 Januari 2022 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Jumadi Akhir 1443 H

29 Januari 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

Dr. Muh. Rum, SE., M.Si

NIDN 0020096301

Pembimbing II

Basri Basir MR, SE., M.Ak

NIDN 0926098904

Mengetahui

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NIDN 0902116603

Ketua Program Studi Akuntansi

Mira, SE., M.AK

NIDN 0903038803





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Nurul Hilmi, Nim 105731139017 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor : 0014/SK-Y/62201/091004/2021 M, tanggal 25 Jumadil Akhir 1443/ 29 Januari 2022 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Jumadil Akhir 1443 H

29 Januari 2022 M

PANITIA UJIAN

- a. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
(Rektor Unismuh Makassar)
- b. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- c. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
- d. Penguji : 1. Dr. Muhammad Rusydi, SE., M.Si
2. Syamsuddin, S.Pd., M.Ak
3. Rini Sulistiyanti, SE., M.Ak
4. Ismail Rasulong, SE., MM

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM 6510919118704 507



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972
Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Nurul Hilmi

No. Stambuk/ NIM : 105731139017

Program Studi : Akuntansi

Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Gowa

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apa bila pernyataan ini tidak benar

Makassar, 27 Jumadil Akhir 1443 H

29 Januari 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

Nurul Hilmi

NIM 105731139017

Diketahui Oleh:

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si

NBM: 651 507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.AK

NBM: 1286844

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda JUSMAYADI dan Ibunda IRNA IDAYANTI yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala dukungan baik materi maupun moral, serta doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang selinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, S.E, M.Ak, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. Muh. Rum, SE, M.Si., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.

5. Bapak Basri Basir MR, S.E., M.Ak selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Asisten/Konsultan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2017 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih kepada adikku yang sangat kucintai Albaraka Perkasa yang betul – betul mengajarkan arti dari sabar. Agar penulis senantiasa sabar dalam proses penulisan ini.
10. Terima kasih kepada sahabat – sahabat tercinta Annisa Rosma Sari, dan Windy Destira yang senantiasa menjadi penyemangat dan penghibur dikala penulis merasa kesusahan.
11. Terima kasih kepada teman – teman tercinta Samita, Mita Aminarti, Henrika Utami, dan Mamiyatul Ilimiyah yang telah menemani saya dari awal sampai penelitian ini selesai.
12. Terima kasih kepada Rizal Efendi yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini sekaligus menjadi moodbooster.
13. Terima kasih kepada Adi Aslam yang menjadi teman begadang selama penulis menyusun skripsi ini.
14. Terimakasih kepada saudaraku Abil Aqsa dan Taufi Khidayat yang senantiasa memacu semangat penulis agar skripsi ini cepat diselesaikan.
15. Terima kasih kepada Mun. Idris Abdillah yang memberikan tempat yang nyaman selama penulis sedang mengerjakan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada Nur Inayah Mansyur selaku teman jalan penulis yang betul – betul dapat mengelola emosi penulis.
17. Terima kasih terutama semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nashrun min Allahu wa Fathun Kariem, Billahi fi Sabilil Haq, Fastabikul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, 09 Jumadil Awal 1443 H

14 Desember 2021 M

Penulis,


MURUL HILMI

ABSTRAK

NURUL HILMI, 2021. Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Gowa. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Muh. Rum, dan Basri Basir MR.

Tujuan penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa. Sampel ini diambil dari kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa dengan jumlah sampel sebanyak 34 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kuantitatif yang diperoleh dari pengumpulan data mencakup data primer. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode skala likert.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan data dengan menggunakan perhitungan statistik melalui aplikasi *Statistical Package For The Social Science (SPSS) Versi 24* mengenai Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa, maka disini penulis menarik kesimpulan yaitu Transparansi Penggunaan Anggaran berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: *Transparansi Penggunaan Anggaran, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah.*

ABSTRACT

NURUL HILMI, 2021. *The Effect of Budget Use Transparency on the Quality of Regional Financial Reports at the Department of Housing, Settlement and Land, Gowa Regency.* Thesis, Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Muh. Rum, and Basri Basir MR.

The purpose of this study is a type of quantitative research that aims to determine the effect of budgetary transparency on the quality of regional financial reports at the Department of Housing, Settlement and Land Affairs, Gowa Regency. This sample was taken from the Office of Housing, Settlement and Land Affairs of Gowa Regency with a total sample of 34 respondents. The type of data used in this study is quantitative data obtained from data collection including primary data, the research instrument used in this research is to use the Likert scale method.

The results of this study show data using statistical calculations through the application of Statistical Package For The Social Science (SPSS) Version 24 regarding the Effect of Budget Use Transparency on the Quality of Regional Financial Reports at the Housing, Settlement and Land Office of Gowa Regency, so here the authors draw conclusions, namely The Transparency of Budget Use has a significant and significant effect on the Quality of Regional Financial Reports in the Gowa Regency Government.

Keywords: Transparency of Budget Use, and Quality of Regional Financial Reports.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Transparansi	6

B. Anggaran	10
C. Laporan Keuangan Daerah	15
D. Gambaran Umum Objek Penelitian	22
E. Penelitian Terdahulu	23
F. Kerangka Konsep	31
G. Hipotesis	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	34
D. Populasi Dan Sampel	38
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisa Data	38
G. Pengujian Hipotesis	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden	47
C. Analisis Statistik Deskriptif	50
D. Analisis Data	51
E. Pengujian Hipotesis	54
F. Pembahasan Hasil Penelitian	56

BAB V PENUTUP	62
PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
Daftar Pustaka	65
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

NOMOR	JUDUL	HALAMAN
Tabel 2. 1	Penelitian terdahulu.....	23
Tabel 3. 1	Definisi operasional	35
Tabel 4. 1	Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	47
Tabel 4. 2	Karakteristik responden berdasarkan umur	48
Tabel 4. 3	Karakteristik responden berdasarkan pendidikan	49
Tabel 4. 4	Karakteristik responden berdasarkan jabatan	49
Tabel 4. 5	Statistik deskriptif	50
Tabel 4. 6	Hasil uji validitas transparansi penggunaan anggaran	51
Tabel 4. 7	Uji validitas laporan keuangan daerah	52
Tabel 4. 8	Hasil uji reliabilitas	52
Tabel 4. 9	Hasil uji regresi sederhana	53
Tabel 4. 10	Uji koefisien determinasi	55
Tabel 4. 11	Uji parsial (Uji T)	55

DAFTAR GAMBAR

NOMOR	JUDUL	HALAMAN
Gambar 2. 1	Kerangka konsep.....	32
Gambar 4. 1	Struktur organisasi.....	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk berdasarkan PERDA No. 11 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah yang diberikan kewenangan dan melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Transparansi dalam penggunaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan transparansi merupakan salah satu prinsip dalam perwujudan pemerintahan yang baik. Transparansi disini juga bisa menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai oleh pemerintah.

Transparansi keuangan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan (trust) karena pemerintah yang terbuka menyampaikan informasi keuangan pada publik lebih dipercaya dibanding yang relatif tertutup. Meningkatkan pengawasan masyarakat (controlling), yaitu mengefektifkan pelaksanaan pembangunan warga perlu disertakan dalam pengawasan, dan pengawasan masyarakat ini akan efektif jika masyarakat mendapatkan informasi tentang pembiayaan program /

kegiatan. Masyarakat juga berhak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui (right to inform and right to know).

Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Peneliti memilih tempat ini dikarenakan tempat ini merupakan lokasi dari Kuliah Kerja Praktek peneliti. Dikarenakan Laporan Keuangan merupakan hal yang dianggap pribadi oleh setiap kantor, maka peneliti memutuskan untuk meneliti kantor tempat peneliti KKP. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengakses laporan keuangan dari kantor tersebut, karena telah adanya hubungan yang terjalin dengan sangat baik selama peneliti KKP di kantor tersebut selama 2 bulan lamanya.

Manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini adalah pentingnya transparansi anggaran terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada dinas tersebut. Hal ini bertujuan agar publik dapat mengetahui dan mendapatkan informasi seputar laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah transparansi dari laporan keuangan akan berdampak positif atau negatif dalam lingkungan masyarakat.

Transparansi kini menjadi hal yang penting dilakukan. Dengan adanya transparansi maka publik akan lebih memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah juga yang tadinya relatif tertutup ada baiknya sekarang lebih terbuka kepada masyarakat. Dikarenakan masyarakat disini memiliki hak untuk mengetahui informasi – informasi seputar laporan keuangan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Dengan begini maka kita bisa menekan tingkat korupsi di negara ini sedikit demi sedikit.

Menurut penelitian terdahulu Salomi J. Hahennusa,(2015) yang berjudul "Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon" dengan menggunakan metode kuantitatif, maka hasil dari penelitian ini adalah hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan. Serta memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah terlaksana dengan baik, serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga transparansi akan terwujud.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul "Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Apakah Transparansi Penggunaan Anggaran Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari referensi tentang pengaruh transparansi penggunaan anggaran terhadap penyajian laporan keuangan daerah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai laporan keuangan daerah terutama pada Lingkungan

Pemerintah Daerah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai wahana untuk latihan dan studi agar lebih mengerti dan memahami faktor – faktor banding antara teori yang diperoleh dalam bangku perkuliahan dengan praktek yang sebenarnya diterapkan dalam Pemerintah Daerah, sehingga dapat dijadikan bekal dalam memasuki dunia kerja nantinya. Selain itu, penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai "Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

b. Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dengan maksud yang bermanfaat bagi para pegawai yang terlibat dalam penyajian laporan keuangan daerah yang mempengaruhi terjadinya Transparansi Anggaran.

c. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi dunia pendidikan, terkhusus pada perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi referensi untuk penelitian – penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Transparansi

1. Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan organisasi. Yang dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting (Acep, 2018).

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi berarti keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fisik harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami. Transparansi dapat dilakukan apabila ada kejelasan tugas kewenangan, ketersediaan informasi kepada publik, proses penganggaran yang terbuka, dan jaminan integritas dari pihak independen mengenai prakiraan fisik, informasi, dan penjabarannya.

Dengan adanya transparansi, maka dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

2. Tujuan Transparansi

Tujuan dari transparansi adalah untuk menjelaskan tentang bagaimana pertanggungjawaban yang dilakukan. Dengan adanya

penjelasan secara transparan, masyarakat akan tahu tentang apa yang telah dilakukan suatu organisasi, berapa besar anggaran yang digunakan, serta bagaimana hasil tindakannya (Kama,2011).

3. Manfaat Transparansi

Menurut (Sri Minarti, 2011) manfaat dari adanya transparansi adalah dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Menurut (Andrianto, 2007) ada beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran, yaitu :

- a. Mencegah terjadinya korupsi.
- b. Dapat dengan mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan suatu kebijakan.
- c. Dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.
- d. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu.
- e. Mengutarakan koleksi sosial karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat ini memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak. Pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang

dikerjakannya. Dengan demikian, transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

4. Asas – Asas Transparansi

Asas – asas transparansi meliputi keterbukaan atas informasi yang disampaikan kepada publik, pemanfaatan informasi kepada publik, dan hasil yang disampaikan secara tepat waktu (Fierda, 2015).

5. Indikator Transparansi

Menurut Andrianto (2007:21), menyatakan bahwa indikator transparansi terdiri dari :

a. Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi. Yang meliputi :

- 1.) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi.
- 2.) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
- 3.) Adanya basis legal untuk pajak.
- 4.) Adanya bisnis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
- 5.) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas

dari masing-masing tingkat pemerintahan.

b. Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran. Yang meliputi :

1.) Adanya keterbukaan dalam rangka kerja anggaran (proses penganggaran).

2.) Diumumkan setiap kebijakan anggaran.

3.) Dipublikasikan hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).

4.) Adanya dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fisik.

5.) Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.

c. Adanya audit independen dan efektif. Yang meliputi :

1.) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif.

2.) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.

3.) Adanya sistem peringatan dini (early warning system) dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.

d. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran. Yang meliputi :

1.) Adanya keterburukan informasi selama proses penyusunan anggaran.

2.) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Laporan keuangan daerah dapat dikatakan transparan apabila memenuhi peraturan berikut yang tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

a. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis.

b. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD diinformasikan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

c. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati melalui camat.

d. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

B. Anggaran

1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun dengan sistematis atau meliputi semua aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit atau kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu tertentu (Munandar, 2011).

2. Tujuan Anggaran

Menurut Sasongko dan Parulian (2013:3), tujuan yang terkait dengan penyusunan anggaran adalah sebagai berikut.

a. Perencanaan

Yang dimaksud dalam hal ini adalah anggaran dapat memberikan arahan bagi penyusunan tujuan dan kebijakan perusahaan.

b. Koordinasi

Koordinasi bertujuan agar anggaran dapat mempermudah koordinasi antar – bagian di dalam perusahaan / organisasi.

c. Motivasi

Yang dimaksud dengan motivasi adalah anggaran membuat manajemen dapat menetapkan target – target tertentu yang harus dicapai oleh perusahaan.

d. Pengendalian

Keberadaan dari anggaran di dalam perusahaan, memungkinkan manajemen untuk melakukan fungsi pengendalian atas aktivitas – aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan.

3. Manfaat Anggaran

Anggaran sangat memiliki banyak manfaat (Nafarin 2019:13), antara lain sebagai berikut:

- a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama.
- b. Dapat dipergunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan pegawai.
- c. Dapat memotivasi pegawai.
- d. Dapat menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap pegawai.
- e. Dapat menghindari pemborosan dan pembayaran yang sebenarnya kurang diperlukan.
- f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.

4. Fungsi Anggaran

Menurut Nafarin (2013:5), seluruh fungsi anggaran di dalam suatu organisasi dapat dikelompokkan ke dalam empat fungsi pokok, yaitu :

a. Planning (Perencanaan)

Fungsi anggaran dalam planning ini adalah untuk menetapkan tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang akan digunakan, dan lain sebagainya. Fungsi ini berkaitan dengan segala sesuatu yang ingin dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Di dalamnya termasuk dalam menetapkan produk yang akan dihasilkan, bagaimana menghasilkannya, sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkannya, dan bagaimana memasarkan produk tersebut.

b. Organizing (Pengorganisasian)

Setelah segala sesuatu yang ingin dihasilkan oleh perusahaan telah dicapai di masa depan yang telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasi rencana tersebut. Dimulai dari upaya untuk memperoleh bahan baku, mencari mesin yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, bangunan yang dibutuhkan untuk mengelola bahan tersebut, mencari tenaga kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan, mencari modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang direncanakan, dan sebagainya.

c. Actuating (Menggerakkan)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap sumber daya yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setiap sumber daya yang ada harus dikerahkan, dan di koordinasikan satu dengan lainnya agar dapat bekerja optimal untuk mencapai tujuan dari perusahaan.

d. Controlling (Pengendalian)

Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dan kemudian di arahkan untuk bekerja sesuai dengan fungsi masing – masing, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa setiap sumber daya tersebut telah bekerja sesuai dengan rencana yang telah dibuat perusahaan untuk menjamin bahwa tujuan perusahaan secara umum dapat dicapai.

Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya untuk menjamin bahwa setiap sumber daya organisasi telah bekerja dengan efektif dan efisien.

5. Kelemahan Anggaran

Di samping anggaran memiliki banyak manfaat, menurut Nafrin (2013:20) anggaran juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu :

- a. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.
- b. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan

mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat.

- c. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif.

6. Langkah – Langkah Menyusun Anggaran

Penyusunan anggaran biasanya dilaksanakan oleh Komite Anggaran. Komite Anggaran tersebut anggotanya terdiri atas para manajer pelaksanaan, fungsi – fungsi pokok perusahaan sesuai dengan prinsip keberansertaan. Anggaran tersebut meliputi : manajer pemasaran, manajer produksi, manajer teknik, manajer pengawasan dan keuangan.

Menurut Nafarin (2013:9), proses penyusunan anggaran dibagi kedalam beberapa tahapan antara lain:

a. Penentuan Pedoman Anggaran

Anggaran yang dibuat pada tahun yang akan datang, sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Dengan demikian anggaran yang dibuat dapat digunakan pada awal tahun anggaran.

b. Persiapan Anggaran

Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan (sales budget) terlebih dahulu menyusun ramalan (sales forecast). Dalam tahap persiapan anggaran ini, biasanya diadakan rapat atas bagian terkait saja.

c. Tahap Penentuan Anggaran

Pada tahap ini, semua manajer dan direksi mengadakan rapat meliputi kegiatan :

- 1.) Perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran.
- 2.) Mengoordinasikan dan menelaah komponen anggaran.
- 3.) Pengesahan dan pendistribusian anggaran.

C. Laporan Keuangan Daerah

1. Pengertian Laporan Keuangan Daerah

Setiap pemerintah daerah, wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Pada dasarnya LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik (APBD).

Terlebih Pasal 32 Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP).

Peraturan Menteri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi, yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pengertian laporan keuangan adalah laporan yang tersruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban. Beberapa laporan keuangan yang bertujuan umum terdiri dari:

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. Masing – masing Kementrian Negara atau Lembaga di Lingkungan Pemerintah Pusat
- d. Suatu organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat / Daerah

2. Tujuan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik

keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan cara sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerima periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya. Baik jangka pendek, maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, tentang kenaikan ataupun penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Sedangkan tujuan laporan keuangan untuk organisasi non bisnis / nirlaba menurut Statement of Financial Accounting Concept

NO.4 (SFAC NO.4) adalah sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat diberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumberdaya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya

dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai sumber daya organisasi.

- b. Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonsubsidi serta kemampuannya untuk melakukan dan memberi pelayanan tersebut.
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
- d. Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
- e. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
- f. Memberikan informasi mengenai bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor – faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.

- g. Memberikan informasi dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

3. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, lokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan - LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

c. Neraca

Neraca menyajikan pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan

saldo akhir kas pemerintah pusat / daerah selama periode tertentu.

e. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, Laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

4. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

b. Pengambilan Keputusan

Informasi laporan keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin. Mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

c. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, yakni menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Walaupun informasi tersebut relevan, tetapi jika penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

d. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

e. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk, serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

D. Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdiri pada saat adanya peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan pertanahan adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang baru terbentuk berdasarkan PERDA No. 11 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah yang diberikan kewenangan dan melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang perumahan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Program unggulan dinas perumahan kawasan permukiman dan pertanahan;

a. Bidang Perumahan

1. Kegiatan BSPS (Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya)
2. Kegiatan PSU (Prasarana Sarana Utilitas)

b. Bidang Permukiman

1. Kegiatan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh)

- c. Bidang Pertanahan
 - 1. Kegiatan Prisitipikatan Asset Pemda
 - 2. Kegiatan Izin Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Negara

E. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
penelitian terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Tri Astuti M (2019)	Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu	Penyajian Keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi penggunaan anggaran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Penyajian Laporan Keuangan Daerah secara lengkap dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh

			aparatur.
2	Wahyu (2018)	Akuntabilitas dan Transparansi Pem erintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa	Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media

			pertanggungjawaban secara periodik.
3	Nur Laila Yuliani (2017, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, ISSN 1412-3126)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Akseibilitas dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi Laporan Keuangan Daerah.
4	Putu Wahyuni (2014, Journal Ak Universitas Pendidikan Ganesha)	Pengaruh Penyajian e-Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap	1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan nilai t_{hitung} adalah 4,778 > nilai t_{tabel} 1,671 dengan

		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris 2. pada Pemerintahan Kabupaten Badung)	nilai signifikansi 0,000 yang berada dibawah atau lebih kecil 0,05. Akseibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, hal ini ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} sebesar 3,128 > nilai t_{tabel} 1,671 dengan signifikansi sebesar 0,003 yang berada dibawah 0,05.
5	Salomi J. Hehanussa (2015, ISSN 2302-9791)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas	Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikansi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan

		Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon	SAP dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektifitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga good governance dan clean government akan terwujud di pemerintahan Kota Ambon.
6	Binti Sa'adah (2015, Jurnal Kebijakan dan	Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui E-Government	Akuntabilitas dan transparansi anggaran yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar sudah

	Manajemen Publik, ISSN 2303 – 341)	(Studi tentang Penganggaran di Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar)	dilaksanakan dengan baik. Namun proses penganggaran secara manual masih rawan terjadinya penyimpangan anggaran. Selain itu, tertutupnya proses penganggaran yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar rawan terjadinya penyimpangan.
7	Angreini Pangumbalerang Sherly Pinatik (2014, Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi Vol.2 NO. 2)	Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik	Penelitian ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIPENDA dan BPKBMD Kota Bitung. Diperlukan penyempurnaan dalam sistem informasi keuangan sehingga penyajian informasi lebih tepat, cepat dan bermanfaat bagi

		Daerah	pengguna informasi keuangan serta perlu mensosialisasikan tujuan penggunaan anggaran dengan sebaik – baiknya sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran.
8	Risya Umami, Idang Nurodin (2017, ISSN 2088 – 6969)	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian yaitu bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.
9	Deti Kumalasari (2016)	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

			pengelolaan ADD. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10	Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anant Lawikarma Tungga Adtmaja Nyoman Trisna Herawati (2015)	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan di tingkat Dadia (Studi Kasus pada Dadia Punduh Sedahan di Desa Pakraman Bila Bajang)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber pemasukan reguler dadia berasal dari peturunan (iuran wajib), pengampel (iuran wajib bagi warga dadia di luar Bali) dan pendapatan bunga peminjaman. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan pengeluaran,

			serta menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman.
--	--	--	--

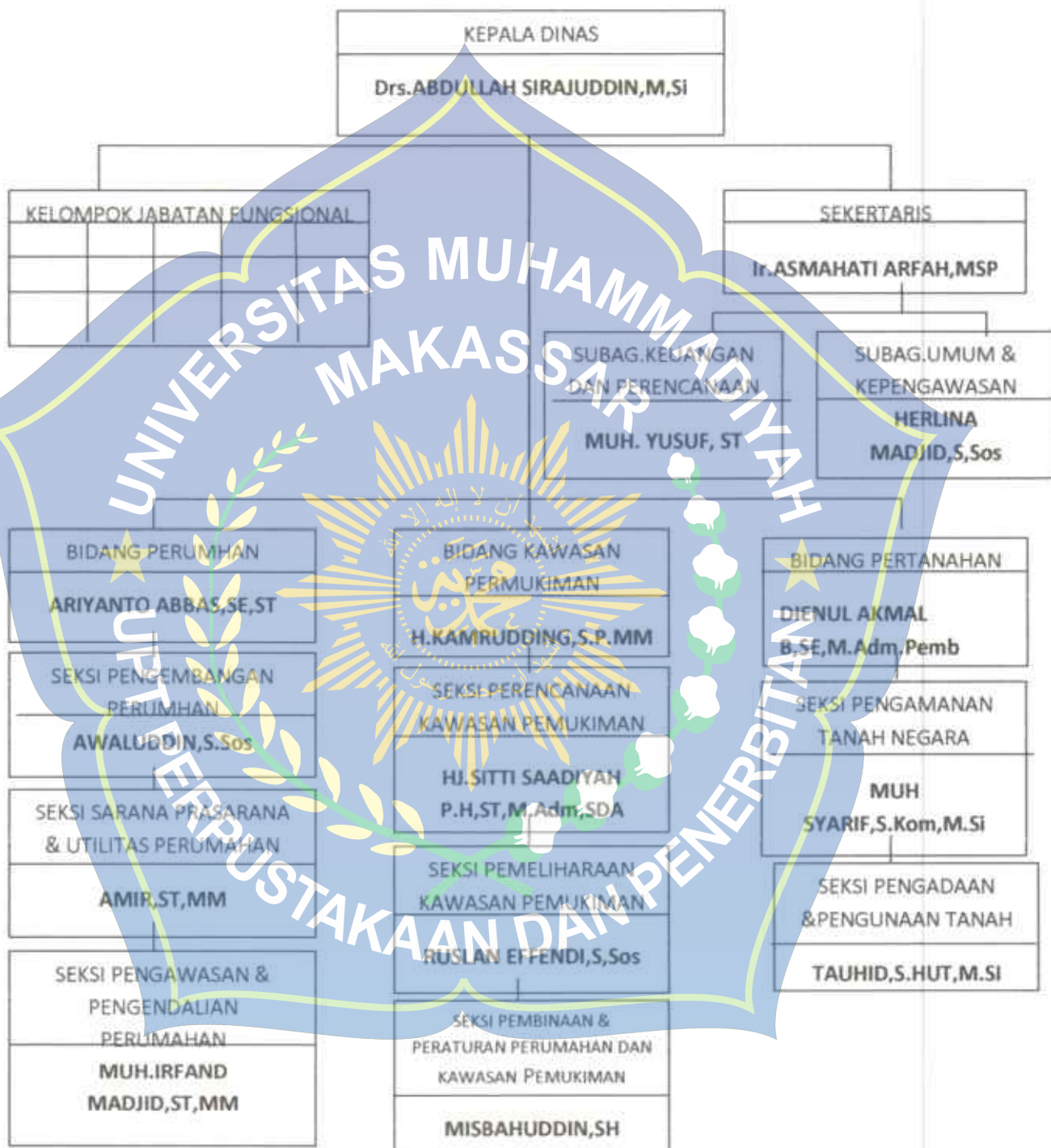
F. Kerangka Konsep

Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas – luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Kerangka konsep teoritis yang menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu pengaruh transparansi penggunaan anggaran terhadap penyajian laporan keuangan daerah adalah

3. Struktur Organisasi dan Job Description

a. Struktur Organisasi



gambar 4. 1

struktur organisasi

b. Job Description

1. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasrkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasrkan pedoman/peraturan/petunjuk yang berlaku agar pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

sekretaris terdiri dari:

- c. Subag. Keuangan dan Perencanaan
- d. Subag. Umum dan Kepengawasan

3. Bidang Perumahan

Kepala bidang perumahan mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan

melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang perumahan berdasrkan pedoman/ peraturan/ petunjuk/ yang berlaku agar/supaya/ untuk tercipta kelancaran tugas.

Bidang Perumahan terdiri dari:

- a. Seksi Pengembangan Perumahan
 - b. Seksi Prasarana Dan Utilitas Perumahan
4. Bidang Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam memimpin dan melaksanakan tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang kawasan permukiman berdasrkan pedoman/peraturan/ petunjuk/ yang berlaku agar/ supaya/ untuk tercipta kelancaran tugas.

Bidang permukiman terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaa Kawasan Permukiman
 - b. Seksi Perencanaan Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Pembinaan dan Kawasan Permukiman
5. Bidang Pertanahan

Bidang pertanahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di bidang pertanahan.

Bidang Pertanahan terdiri dari:

- a. Seksi Pengamanan Tanah Negara
- b. Seksi Pengadaan dan Penggunaan Tanah

B. Analisis Deskriptif Karakteristik Responden

Pengambilan data dalam penelitian yang dilakukan ini yaitu dengan menyebarkan koesioner kepada 32 responden yang berhubungan dengan tiap – tiap variable yang diteliti. Berikut ini akan dideskripsikan identitas responden meliputi jenis kelamin, umur, pendidikan dan jabatan. Pengungkapan identitas responden semata dimaksudkan untuk dapat menggambarkan berbagai karakteristik responden setempat yang terjaring dalam penelitian ini.

1. Jenis Kelamin

Tabel 4. 1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki – laki	27	79,41 %
2	Wanita	7	20,58 %
Total		34	100 %

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai pada Dinas Prumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa untuk jenis kelamin laki – laki iyaitu sebanyak 26 pegawai dari 32 responden atau 81,25Persen, sementara untuk jenis

kelamin wanita yaitu sebanyak 6 pegawai dari 34 responden atau 18,75Persen.

2. Umur

Tabel 4. 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	20 – 30	2	5,88 %
2	31 – 40	23	67,64 %
3	>50	9	26,48 %
Total		34	100 %

Sumber: Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwakarakter usia responden pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa yang berusia 20- 30 tahun yaitu sebanyak 2 pegawai dari 34 responden atau 5,88Persen, sementara responden umur 30 – 40 tahun yaitu sebanyak 23 pegawai atau 67,64 Persen, dan rresponden umur >50 tahun sebanyak 9 pegawai atau 26,48 Persen. Komposisi tersebut memberikan gambaran bahwa dari karakteristik umur sampel – sampel penelitian cukup mewakili populasi.

3. Pendidikan

Tabel 4. 3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SLTA	6	17,64 %
2	S1	18	52,95 %
3	S2	10	29,41 %
Total		34	100 %

Sumber : Hasil Olah Data 2021

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa karakter pendidikan responden pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa dengan pendidikan terakhir SLTA sebanyak 6 pegawai atau 17,64%, responden dengan pendidikan terakhir S1 sebanyak 18 pegawai atau 52,95%, dan responden dengan pendidikan terakhir S2 Sebanyak 10 orang atau sebanyak 29,41%. Komposisi tersebut memberikan gambaran bahwa dari karakteristik pendidikan, sampel – sampel penelitian cukup mewakili populasi

4. Jabatan

Tabel 4. 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

NO.	Jabatan	Jumlah	Persentase
1	Kepala Dinas	1	2,94 %
2	Sekretaris Dinas	1	2,94 %

3	Bidang Sekretariat	8	23,53 %
4	Bidang Perumahan	10	29,42 %
5	Bidang Permukiman	6	17,64 %
6	Bidang Pertanahan	8	23,53 %
Total		34	100 %

Sumber : Hasil Olah Data 2021

C. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, variabel transparansi penggunaan anggaran yang terdiri dari 34 responden, memiliki jawaban yang bervariasi dengan nilai minimal 17, maksimal 33, rata-rata 26,94 dan standar Deviasi 4,836. Sedangkan variabel laporan keuangan daerah dengan 34 responden memiliki jawaban minimal sebesar 11, nilai maksimum sebesar 24, nilai rata-rata 20,03 dan nilai standar deviasi sebesar 3,424.

Tabel 4. 5

Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TransparansiPenggunaanAnggaran	34	17	33	26.94	4.836
LaporanKeuanganDaerah	34	11	24	20.03	3.424
Valid N (listwise)	34				

Sumber : output SPSS 24

D. Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu instrumen dengan melakukan uji validitas untuk menghasilkan data yang valid dan berkorelasi signifikan dengan nilai r_{tabel} dihitung dengan menggunakan analisis df (degree of freedom) dengan rumus $df = n - 2$. Hasil pengujian validitas ditampilkan pada tabel – tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 6

Hasil Uji Validitas Transparansi Penggunaan Anggaran

NO.	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,609	0,338	Valid
2	0,797	0,338	Valid
3	0,533	0,338	Valid
4	0,341	0,338	Valid

Sumber : output SPSS 24

Berdasarkan table diatas dengan hasil penelitian validitas variabel transparansi penggunaan anggaran menunjukan bahwa semua item yang diuji dalam penelitian ini masing – masing instrument pernyataan dikatakan valid karena mempunyai nilai korelasi ($r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$).

Tabel 4. 7

Uji Validitas Laporan Keuangan Daerah

NO.	r _{hitung}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,682	0,338	Valid
2	0,658	0,338	Valid
3	0,378	0,338	Valid

Sumber: Output SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas dengan hasil pengujian validitas variabel laporan keuangan daerah menunjukan bahwa semua item yang diuji dalam penelitian ini masing – masing instrument pernyataan dikatakan valid karena mempunyai nilai korelasi ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji suatu instrumen dikatakan reliabel apabila jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Hasil pengujian reliabilitas sebagai berikut.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Datas Reliabilitas	Reliabilitas
Transparansi			
Penggunaan Anggaran (X)	0,801	0,60	Reliabel
Laporan Keuangan	0,740	0,60	Reliabel

Daerah (Y)			
------------	--	--	--

Sumber : Output SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel X dan Y > 0.60. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap variabel diatas reliable.

3. Uji Regresi Sederhana

Analisis regresi linear sederhana dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh transparansi penggunaan anggaran (X) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Tabel 4. 9
Hasil Uji Regresi Sederhana

Model	B	Std. Error	Beta
(Constant)	3.779	1.942	
Transparansi	0.606	0.071	0.836

Sumber : output SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat persamaan regresi sederhana sebagai berikut.

$$Y = a + Bx + e$$

$$Y = 3.779 + 0.606x + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi diatas, dapat diketahui dengan nilai sebagai berikut.

1. Konstanta sebesar 3,779 yang artinya semua variabel independen dianggap konstan kinerja pegawai pada kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa sebesar 3,779.
2. Transparansi penggunaan anggaran (X) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,606. Hal ini menunjukkan jika terjadi kenaikan pada variabel Transparansi Penggunaan Anggaran sebesar 1% maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,606%.

E. Pengujian Hipotesis

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel besarnya nilai koefisien R square adalah 0,699, hal ini berarti 69% variable Kualitas Laporan Keuangan Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah, sedangkan sisanya ($100\% - 69\% = 31\%$) dijelaskan oleh sebab – sebab yang lain.

Tabel 4. 10

Uji Koefisien Determinasi

Model Predictors	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Transparansi	0.836	0.699	0.689	1.936

Sumber : output SPSS 24

2. Uji Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen. Dimana Jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_a diterima sehingga variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4. 11

Uji Parsial (Uji T)

Model Dependent Variable	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
laporan keuangan daerah					
Constant	3.779	1.942		1.946	0.061
Transparansi	0.606	0.071	0.836	8.482	0,000

Sumber : output SPSS 24

Berdasarkan hasil dari olah data diatas, maka pengujian hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut. Berdasarkan table diatas, diperoleh nilai koefisien regresi untuk Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,606 dengan signifikansi 0,000. Hal ini artinya nilai signifikannya jauh lebih kecil dari 0,05 dan menunjukan bahwa Transparansi Penggunaan Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan arah koefisien regresi positif, sehingga dengan demikian hasil pengujian untuk hipotesis tersebut diterima. Ini berarti Kualitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Penggunaan Anggaran.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data diatas, maka transparansi anggaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh karena seluruh prosedur akuntansi sudah dilaksanakan dengan baik sampai laporan keuangan diterbitkan. Kemudian seluruh pertanggungjawaban melibatkan masyarakat, dan laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan independen.

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Salomi (2015) pada Kota Ambon yang menunjukan bahwa penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap

pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah tetap terlaksana dengan baik, serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah menurut Tri Astuti M (2019) berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi penggunaan anggaran pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. Penyajian Laporan Keuangan Daerah secara lengkap dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku dan mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh aparatur. Akuntabilitas menurut Wahyu (2018) merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dari awal hingga akhir dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik.

Transparansi Menurut Nur Laila Yuliani Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap transparansi Laporan Keuangan Daerah. Penyajian laporan keuangan menurut Putu Sri Wahyuni berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas dan transparansi menurut Binti Sa'ada adalah

anggaran yang sudah dilaksanakan dengan baik. Namun proses penganggaran secara manual masih rawan terjadinya penyimpangan anggaran. Selain itu, tertutupnya proses penganggaran yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar rawan terjadinya penyimpangan

Transparansi anggaran Menurut Angreini Pangumbalerang Sherly Pinati bahwa penelitian ini menunjukkan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah DIPENDA dan BPKBMD Kota Bitung. Diperlukan penyempurnaan dalam sistem informasi keuangan sehingga penyajian informasi lebih tepat, cepat dan bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan serta perlu mensosialisasikan tujuan penggunaan anggaran dengan sebaik – baiknya sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menurut Risya Umami, Idang Nurodin bahwa penelitian tersebut berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Transparansi dan akuntabilitas Menurut Deti Kumalasari dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan menurut Ni Ketut Juni Kalmi Dewi, Anant awikarma Tungga Adtmaja, Nyoman Trisna herawai menyatakan hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumber pemasukan reguler dadia berasal

dari peturunan (iuran wajib), pengampel (iuran wajib bagi warga dadia di luar Bali) dan pendapatan bunga pinjaman. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan pengeluaran, serta menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman.

Salah satu upaya pencegahan terjadinya perilaku korupsi adalah dengan mengoptimalkan transparansi informasi keuangan daerah. Berdasarkan peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara menyeluruh dan terbuka atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai dengan peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. Selain itu, transparansi juga merupakan proses demokrasi yang esensial, setiap warga negara dapat melihat secara terbuka dan jelas atas aktivitas dari pemerintah mereka daripada membiarkan aktivitas tersebut dirahasiakan. Hal ini berarti transparansi merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan daerah dapat mencegah korupsi..

Transparansi keuangan disini sangat penting, hal itu dapat dijelaskan dengan meningkatkan kepercayaan (*trust*) dan dampak tidak langsung terhadap *satisfaction* (Kepuasan). Pemerintah yang tidak mempublikasikan informasi keuangan dapat diduga kurang berkompeten dalam mengelola dan melaporkan keuangan. Umumnya pemerintah yang tertutup tidak dapat menjelaskan mengapa kinerja pembangunan mereka

kurang baik dan belum berhasil. Oleh karena itu diperlukan transparansi pengelolaan keuangan daerah berupa penyediaan informasi pengelolaan keuangan daerah di situs resmi pemerintah daerah yang merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena adanya transparansi pengelolaan keuangan diyakini dapat meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Informasi publik yang dapat diakses oleh publik dapat mengurangi penyimpangan yang terjadi. Informasi yang dikecualikan dari publik adalah informasi yang tidak boleh disebarluaskan ke publik dengan alasan dapat mengakibatkan ancaman keamanan bagi negara, seperti informasi laporan keuangan yang belum diaudit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Instruksi Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ Tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah seharusnya menjadi awal terlaksananya transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah memberikan amanah kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyiapkan *menu* konten dengan nama 'Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah' dalam *website* resmi pemerintah dan mempublikasikan data mutakhir pada menu konten tersebut sebagai langkah konkret atas transparansi keuangan daerah.

Pengungkapan informasi laporan keuangan ini dapat diimplementasikan melalui media sosial internet berupa penyajian di halaman web masing-masing Pemerintah Daerah. Hal tersebut dipicu karena kebutuhan akan informasi realtime telah menjadi kebutuhan

utama. Informasi melalui website yang bersifat dinamis diharapkan mampu memberikan aliran informasi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat.

Penggunaan website dalam upaya transparansi pengelolaan keuangan daerah tersebut akan memunculkan masalah baru, yakni keamanan. Keamanan disini menjadi aspek terpenting karena data yang akan diakses oleh publik merupakan data menyangkut APBN dan APBD. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyiapkan protokol keamanan teknologi informasi yang dibangun sebagai bentuk upaya mewujudkan transparansi keuangan daerahnya. BSSN sudah menetapkan berbagai standar teknis dan prosedur dalam pengamanan informasi keuangan yang di *share* ke publik secara on line.

Melakukan pemeringkatan resmi atas transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis website pada seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang dilakukan secara berkala sebagai alat ukur kepatuhan atas peraturan perundangan dan memotivasi pemerintah daerah agar lebih transparan di dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, maka peneliti mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan judul Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi penggunaan anggaran pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa.

Berdasarkan hasil Uji T, diperoleh nilai koefisien regresi untuk Variabel Penyajian Laporan Keuangan Daerah sebesar 0,606 dengan signifikansi 0,000. Hal ini artinya nilai signifikannya jauh lebih kecil dari 0,05 dan menunjukan bahwa Transparansi Penggunaan Anggaran memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan arah koefisien regresi positif, sehingga dengan demikian hasil pengujian untuk hipotesis tersebut diterima. Ini berarti Kualitas

Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Transparansi Penggunaan Anggaran.

Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Salomi (2015) pada Kota Ambon yang menunjukkan bahwa penyajian Laporan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas public sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah tetap terlaksana dengan baik, serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi peneliti lanjutan agar penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel yang terkait dengan transparansi laporan keuangan daerah.
2. Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah disarankan dalam menyusun anggaran agar melibatkan masyarakat, melibatkan seluruh fungsi memberikan informasi yang terkait dengan tujuan penggunaan anggaran.

3. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan teoritis bahwa untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas maka perlu transparansi, terbuka pada masyarakat,



Daftar Pustaka

Albugis, febriana F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 4(3), 78–89.

Fajri, M. (2015). ANALISIS TERHADAP METODE PERHITUNGAN ANGGARAN PENJUALAN PADA CV CAHAYA MAJU ELEKTRONIK PALEMBANG. 151, 10–17.

M, T. A. (2019). Pengaruh Transparansi Penggunaan Anggaran Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 26(3), 1–4.

Nasirwan, M. M. R. (2017). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BERBASIS BAGI HASIL (ANALISIS TERHADAP KARYAWAN ToKo DI KoTA BEURELINJEN). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–20.

Rahayu, A. D., Fitriano, Y., & Yanti, R. T. (2021). Analisis Anggaran Penjualan dalam Meningkatkan Laba pada Toko Dadang di Desa Sukamakmur. 88–93.

Saputra, M. A. (2018). ANALISIS ANGGARAN DAN REALISASI PENJUALAN PADA CV YUWONO MITRA MANIRI PALEMBANG.

Sn Haryanti, M. E. K. (2019). Analisis transparansi akuntabilitas laporan keuangan masjid di Wonosobo (Studi empiris pada masjid yang terdaftar di Kemennag Kabupaten Wonosobo Tahun 2019). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 140–149.

Uli, E. (2016). ANALISIS TERHADAP METODE ANGGARAN PENJUALAN PADA PT FINANSIA MULTIINANCE (KREDIT PLUS) CABANG

PRABUMULIH. 05(02), 170–188.

Adha W., Ratnawati V., & Al-azhar, A. (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada Skpd Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(2), 1–15.

Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1), 28–47.

Pangumbaleng, A., & Pinatik, S. (2014). Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik

Daerah. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi,

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.





KUESIONER

Makassar, 21 September 2021

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner

Kepada Yth

Bapak/Ibu Pegawai

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar, saya :

Nama : Nurul Hilmi

Nim : 105731139017

Fak/Jur/Smtr : Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi/VIII

Untuk melakukan penelitian ilmiah dalam penyusunan skripsi dengan judul:

Pengaruh transparansi penggunaan anggaran terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa

Untuk itu saya mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden dengan mengisi lembar kuesioner secara lengkap. Dalam hal ini jawaban kuesioner dijadikan data dalam penyusunan skripsi, sebagai persyaratan menyelesaikan studi (S1) dan digunakan untuk keperluan ilmiah semata tidak memiliki unsur terhadap eksistensinya, sehingga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi, di peneliti dana penelitian selanjutnya, atas ketersediaannya saya mengucapkan terima kasih.

Hormat saya

Peneliti
(Nurul Hilmi)

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian :

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak / Ibu / Saudara / Saudari untuk masing – masing pernyataan yang tersedia pada lembar daftar kuesioner. Bapak / Ibu / Saudara / Saudari cukup memberikan tanda centang pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu: SS, S, RR, TS dan STS. Adapun skor untuk masing – masing jawaban adalah sebagai berikut:

Skor 5 Sangat Setuju (SS)

Skor 4 Setuju (S)

Skor 3 Ragu – Ragu (RR)

Skor 2 Tidak Setuju (TS)

Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)

Identitas Responden :

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Jabatan :

Pendidikan Terakhir :

Transparansi Penggunaan						
NO.	Anggaran	SS	S	RR	TS	STS
	X					
Menyediakan Informasi						
1	Informasi yang disajikan sesuai dengan fakta dan analisis keputusan – keputusan yang telah diambil.					
2	Menyediakan informasi tentang tanggung jawab penggunaan biaya – biaya.					
Informasi Harus Diungkapkan Secara Lengkap						
3	Terdapat akurasi kelengkapan informasi berhubungan dengan penyusunan laporan penggunaan anggaran					
4	Laporan keuangan menggambarkan secara akurat transaksi serta peristiwa lainnya yang disajikan					
5	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran selalu tepat waktu					
Adanya Media Untuk Menyampaikan Pendapat						
6	Laporan keuangan dan laporan hasil audit BPK dipublikasikan di website resmi pemerintahan daerah					

7	Laporan keuangan penggunaan anggaran oleh SKPD diriview oleh inspektorat sebelum diserahkan kepada BPK					
8	Pelaporan hasil penggunaan anggaran mudah diakses oleh public/ masyarakat.					

Penyajian Laporan Keuangan						
NO.	Daerah	SS	S	RR	TS	STS
	Y					
		Relevan				
1	Bentuk pelaporan keuangan penggunaan anggaran telah sesuai dengan system yang dianut					
2	Laporan keuangan penggunaan anggaran telah melalui verifikasi oleh pejabat yang berwenang / BPK					
3	Laporan keuangan penggunaan anggaran mencerminkan pertanggungjawaban kinerja pemerintah					
	Dapat dibandingkan					

4	Laporan keuangan penggunaan anggaran dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sejenisnya					
5	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
		Dapat dipahami				
6	Informasi yang tersaji dalam laporan keuangan penggunaan anggaran mudah dipahami dengan jelas					



Tabel Perhitungan Kuesioner X

Responden	TRANSPARANSI (X)								Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	1	3	5	2	1	2	1	17
2	2	1	3	5	2	1	2	1	17
3	1	2	2	3	3	2	3	2	18
4	2	3	2	3	2	3	2	3	20
5	4	2	3	3	3	2	3	2	22
6	3	1	4	4	4	1	4	1	22
7	4	2	4	3	3	2	3	2	23
8	2	3	3	3	2	3	3	3	22
9	2	3	3	3	2	3	3	3	22
10	2	3	3	3	2	3	3	3	22
11	3	4	4	3	2	4	2	4	26
12	3	4	4	2	2	4	2	4	25
13	3	3	5	3	3	3	3	3	26
14	4	2	4	5	4	2	4	2	27
15	3	3	4	3	4	3	4	3	27
16	3	4	3	3	3	4	3	4	27
17	3	4	3	4	3	4	3	4	28
18	3	4	3	4	3	4	3	4	28
19	3	4	3	4	3	4	3	4	28
20	3	5	4	3	2	5	2	5	29
21	4	3	4	5	4	3	4	3	30
22	4	3	4	5	4	3	4	3	30
23	5	4	4	5	2	4	2	4	30
24	3	4	4	4	4	4	4	4	31
25	4	4	4	5	3	4	3	4	31
26	3	4	4	4	4	4	4	4	31
27	3	4	4	4	4	4	4	4	31
28	4	5	3	4	3	5	3	5	32
29	3	4	4	5	4	4	4	4	32
30	3	4	4	5	4	4	4	4	32
31	3	4	4	4	4	4	5	4	32
32	3	4	4	4	4	4	5	4	32
33	5	4	4	4	4	4	4	4	33
34	3	5	3	4	4	5	4	5	33

Tabel Perhitungan Kuesioner (Y)

Responden	LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Y)						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	1	1	3	1	2	3	11
2	3	2	2	3	2	2	14
3	3	1	3	3	3	2	15
4	1	4	3	1	3	4	16
5	4	2	2	4	3	3	18
6	3	2	3	3	3	3	17
7	3	3	2	3	2	3	16
8	3	3	3	3	3	3	18
9	4	3	2	4	3	3	19
10	3	3	4	3	3	4	20
11	3	3	3	3	2	3	17
12	3	3	3	3	2	3	17
13	3	3	3	3	2	3	17
14	4	3	3	4	3	3	20
15	2	3	4	2	4	3	18
16	4	3	4	4	3	4	22
17	4	3	3	4	5	5	24
18	4	3	3	4	5	4	23
19	3	5	4	4	4	4	24
20	3	3	4	3	4	4	21
21	4	4	3	4	5	3	23
22	3	4	4	3	3	4	21
23	4	4	4	4	4	4	24
24	4	4	4	4	3	4	23
25	4	5	2	4	4	4	23
26	4	3	5	4	3	3	22
27	4	3	4	4	5	4	24
28	5	3	2	5	3	4	22
29	2	3	4	2	4	3	18
30	4	3	4	4	3	4	22
31	4	3	3	4	5	5	24
32	4	3	3	4	5	4	23
33	3	5	4	4	4	4	24
34	3	3	4	3	4	4	21

Hasil Uji Validitas Data

a. Uji Validitas

1. Transparansi Penggunaan Anggaran

[illegible]

X8	Pearson Correlation	0.285	1.000**	0.18	-0.072	0.15	1.000**	0.154	1	.797**
	Sig. (2-tailed)	0.102	0	0.31	0.686	0.397	0	0.384		0
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34
TOTAL X	Pearson Correlation	.609**	.797**	.533**	.341*	.632**	.797**	.584**	.797**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0.001	0.048	0	0	0	0	
	N	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Sumber : output SPSS 24

2. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	TOTALY
Y1	Pearson Correlation	1	0.178	-0.127	.963**	0.331	0.302	.682**
	Sig. (2-tailed)		0.314	0.474	0	0.056	0.083	0
	N	34	34	34	34	34	34	34
Y2	Pearson Correlation	0.178	1	0.249	0.316	.348*	.511**	.658**
	Sig. (2-tailed)	0.314		0.155	0.068	0.044	0.002	0
	N	34	34	34	34	34	34	34
Y3	Pearson Correlation	-0.127	0.249	1	-0.062	0.244	0.284	.378*
	Sig. (2-tailed)	0.474	0.155		0.727	0.164	0.103	0.028
	N	34	34	34	34	34	34	34
Y4	Pearson Correlation	.963**	0.316	-0.062	1	.368*	.344*	.753**
	Sig. (2-tailed)	0	0.068	0.727		0.032	0.047	0
	N	34	34	34	34	34	34	34
Y5	Pearson Correlation	0.331	.348*	0.244	.368*	1	.590**	.739**
	Sig. (2-tailed)	0.056	0.044	0.164	0.032		0	0
	N	34	34	34	34	34	34	34

Y6	Pearson Correlation	0.302	.511**	0.284	.344*	.590**	1	.745**
	Sig. (2-tailed)	0.083	0.002	0.103	0.047	0		0
	N	34	34	34	34	34	34	34
TOTALY	Pearson Correlation	.682**	.658**	.378*	.753**	.739**	.745**	1
	Sig. (2-tailed)	0	0	0.028	0	0	0	
	N	34	34	34	34	34	34	34

Sumber : output SPSS 24

b. Uji Reliabilitas

1. Transparansi Penggunaan Anggaran

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.801	8

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	23.85	19.038	0.477	0.784
X2	23.59	16.128	0.687	0.748
X3	23.38	20.425	0.424	0.792
X4	23.09	21.295	0.172	0.824
X5	23.82	18.938	0.509	0.78
X6	23.59	16.128	0.687	0.748
X7	23.68	19.256	0.447	0.788
X8	23.59	16.128	0.687	0.748

2. Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Cronbach's Alpha	N of Items
0.74	6

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	16.71	8.396	0.503	0.696
Y2	16.91	8.447	0.461	0.708
Y3	16.76	10.307	0.157	0.781
Y4	16.65	7.932	0.601	0.666
Y5	16.62	7.698	0.556	0.679
Y6	16.5	8.621	0.628	0.671

Sumber : output SPSS 24

c. Uji Regresi Linear Sederhana

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	Sig.
1	Regression	269.767	1	269.767	.000 ^b
	Residual	116.233	31	3.749	
	Total	386.000	32		

a. Dependent Variable: laporan keuangan daerah

b. Predictors: (Constant), Transparansi

d. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.699	.689	1.936

a. Predictors: (Constant), Transparansi

e. Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.779	1.942		1.946	.061
	Transparansi	.806	.071	.836	8.482	.000

a. Dependent Variable: laporan keuangan daerah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.740	6



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN & PERTANAHAN
Jl. Beringin, Sungguminasa-Sombaspu (50111)
Email: perintarpemkabgowa@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 801/44g/Pertanahan

Bersamaan Surat dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor:

Nama	Nurul Hilmi
Tempat/Tanggal Lahir	Lembang, 19 April 2000
Nomor Pokok	105231130017
Jenis Kelamin	Laki-laki
Pengantar	Murawati
Alamat	Jl. Hertasning

Adalah: Diberi keterangan bahwa penelitian/pengumpulan data telah selesai
penyusunan Tugas Akhir/Skripsi dengan judul "PENGARUH TRANSPARANSI
PENGUPAAN KAWASAN PERMUKIMAN TERHADAP LAPORAN KEUMAHURAN DAERAH
PADA DAERAH PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN GOWA" yang dibuat Tanggal 21 September 2021 dan 21 Oktober 2021

Bersamaan surat Keterangan ini buat untuk keperluan sebagaimana: ...

Makassar, 17 Desember 2021

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN GOWA





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90222 Telp (0411) 8665972-881 Fax (0411) 8665588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nurul Hilmi
NIM : 1055110007
Program Studi : Akuntansi

Dipaparkan nilai:

No	Bab	Nilai	Angka Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	25%	25 %
3	Bab 3	8%	10 %
4	Bab 4	4%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 24 Januari 2022

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan.

Nur Hafid, S.Hum, M.P.
NPM. 064 591

AB I Nurul Hilmi - 105731139017

Similarity Index

10%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



digilib.unismuh.ac.id

Internet Source

4%



eprints.uny.ac.id

Internet Source

3%



documents.mx

Internet Source

2%



repository.unsmuh.ac.id:8080

Internet Source

2%

Exclude Quotes

Exclude Bibliography

Exclude References

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

AB II Nurul Hilmi - 105731139017

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

REMARKS/SOURCES



Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Jawa Timur

9%



digilibadmin.unismuh.ac.id

8%



123dok.com

4%



andichairilfurnan.wordpress.com

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

III Nurul Hilmi - 105731139017



- Submitted to Triakt University
- 1
- 2
- Muhammad Saifullah Farid, Dzik Sahal N, Hani Herlina, "Pengaruh Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Alquran Hadeis", Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, 2019
- 5%
- 2%
- 2%
- ojs.mpuentular.ac.id

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches



AB IV Nurul Hilmi - 105731139017

4%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



www.klinikakuntansi.net

Internet

2%



digilibadmin.unismuh.ac.id

Internet Source

2%

Excluded quotes

Excluded bibliography

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



AB V Nurul Hilmi - 105731139017

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

EMPTY SOURCES



www.slideshare.net

5%



BIOGRAFI PENULIS



Nurul Hilmi. Panggilan Hilmi, lahir di Bulukumba pada tanggal 19 April 2000 dari pasangan suami istri Bapak Jusmayadi dan Ibu Irma Idayanti. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Hertasing tepatnya di BTN Minasa Upa bersama dengan kakek dan neneknya.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK Mamampang Desa Ara lulus tahun 2005, SDN 164 Ara lulus tahun 2011, SMPN 33 Bulukumba lulus tahun 2014, SMAN 16 Bulukumba lulus tahun 2017 dan mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

